

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M.C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting, Hal. 1-16*.
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review Vol.1, No. 1, Hal. 35-52*.
- BPS. (2019). Kota Cirebon Dalam Angka 2018 [online]. Tersedia: <https://cirebonkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/a17445e317d62cea861db32c/kabupaten-cirebon-dalam-angka-2018.html> [22 Oktober 2019].
- BPS. (2019). Kota Bekasi Dalam Angka 2018 [online]. Tersedia: <https://bekasikota.bps.go.id/publication/2018/08/16/afa134842a8e09b9646c6091/kota-bekasi-dalam-angka-2018.html> [22 Oktober 2019].
- BPS. (2019). Kabupaten Karawang Dalam Angka 2018 [online]. Tersedia: <https://karawangkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/15536517a5343ea085261b3c/kabupaten-karawang-dalam-angka-2018.html> [22 Oktober 2019].
- BPS. (2019). Kota Subang Dalam Angka 2018 [online]. Tersedia: <https://subangkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/fbf586fd952afd9aa9db7052/kabupaten-subang-dalam-angka-2018.html> [22 Oktober 2019].

- BPS. (2019). Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2018 [online]. Tersedia: <https://indramayukab.bps.go.id/publication/2018/08/16/99305d123f315f796f19b6d4/kabupaten-indramayu-dalam-angka-2018.html> [22 Oktober 2019].
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). Peran Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia Vol. 9, No. 2, Hal. 136-153*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- KPP Pratama Cirebon Satu. (2019). Profil KPP Pratama Cirebon Satu. Cirebon.
- Laucereno, S. F. (2019, 17 Juni). Utang Luar Negeri RI Sampai Rp5.528 T, Bahaya Nggak? [online]. Tersedia: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4589118/utang-luar-negeri-ri-sampai-rp-5528-t-bahaya-nggak> [22 Oktober 2019].
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.

Ortax. (2011). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima [online]. Tersedia: <https://www.ortax.org/> [22 November 2019].

Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18.2, Hal. 1112-1140. ISSN: 2302-8556*.

Quddus, G. G. (2018, 10 Juli). Penerimaan pajak semester I-2018 tumbuh 16,7%, ini sebab dan detailnya [online]. Tersedia: <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-semester-i-2018-tumbuh-167-ini-sebab-dan-detailnya> [19 Juli 2020].

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 112/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. [online]. Tersedia : https://www.pajakku.com/tax-guide/6911/KEP_DIRJEN_PJK/KEP-112/PJ./2007 [16 Oktober 2019].

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. [online]. Tersedia : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM> [22 November 2019].

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. [online]. Tersedia : <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/210~PMK.01~2017Per.pdf> [16 Oktober 2019].

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 27/PJ/2020 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. [online]. Tersedia : <https://peraturanpajak.com/2020/05/13/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-27-pj-2020/> [21 Juli 2020].

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ/2013 tentang Panduan Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak. [online]. Tersedia : http://www.ortax.org/files/downaturan/13PJ_SE09.pdf [23 Oktober 2019].

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Republik Indonesia, UU No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [online]. Tersedia : <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007> [2 Oktober 2019].

- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan kasus (Edisi 9 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting, Hal. 1-17*.
- Sabil, Pujiwidodo, D., & Lestiniingsih, A. S. (2018). Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SIKAP, Vol.2, No.2, 122-135. ISSN 2541-1991 e-ISSN 2599-1876*.
- Subarkah, J., & Dewi, M.W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 17, No. 2, Hal. 61-72. ISSN 1412-629x*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tjahono, M. B. (2018, 20 April). Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita? [online]. Tersedia: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita> [23 Oktober 2019].
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak. *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper, Hal. 308-326. ISSN 2560-0784*.